

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Affan Gaffar 1992, *Kualitas Pemilu Mementukan Kualitas DPR*. UII Press Yogyakarta.
- Agun Gunanjar Sudarsa 2013, *Pancasila Sebagai Rumah Bersama Wahana Semesta* Intermedia Jakarta.
- Azhari, 1995 *Negara Hukum Indonesia analisis normative tentang unsur unsurnya*, UII Pers, Jakarta,
- Arifin Ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Wonosobo 17 Februari 2019
- Binardi Syahrizal ketua team advokasi pengurus cabang Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo 17 Februari 2019
- Sugeng Susilo, Masyarakat Kabupaten Wonosobo, Pada Tanggal 16 Februari 2019.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. UGM Press, Yogyakarta:
- Djauhari, 2008, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia, Studi Tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, Cetakan Kesatu, Unissula Press, Semarang.
- Djoko Prakosa. 1885 *Proses Pembentukan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno, ¹⁹⁹⁷ *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1 Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta,.
- Hasan Mohammad Tiro, 1999, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press, Jakarta,
- Henry B. Mayo, 1960, *An Intoduction to Democraton Theory*, Oxford Univercity Press.
- Hilman Hadi Kusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses Pukul 11.30 Tanggal 04 Maret 2019
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Inu Kencana Syafie, , 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP UI Press, Depok.
- Iswara, 1996, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhirwantara, Bandung,

- Iza Rumesten, R.S. 2012, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang, .
- Jimly asshiddiqi, 2006 Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi pres, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2001, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Joko Prakoso, 1985, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung,
- L.J Van Apeldorn 1978, Pengantar Ilmu Pradnya Paramita ,Jakarta ,
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Cetakan Keempat, Andi, Yogyakarta,
- Maria Farida Indrati Soeprato, 2010, Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Pembentukannya, Rajawali Pres Jakarta,
- Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan (1), Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta,.
- Miftah Thoha, 2012, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Mata Pena Institute dan Thafa Media, Yogyakarta,
- Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta:
- Miriam Budiardjo, 2009, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Moh. Mahfud MD, 1993 Demokrasi Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, ,
- Monterio, Josef Mario, 2016. Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 119
- Muhammad Ichsan, 2014, Demokrasi dan Syura : Perspektif Islam dan Barat, Substantia , Vol. 16 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawitah Cot Kala, Langsa,
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta
- Mukhlis Taib, 2017 Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung,
- Mukhtie Fajar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Jakarta
- Misron selaku anggota masyarakat Kabupaten Wonosobo 16 Februari 2019
- Miswanto Anggota DPRD Anggota Pansus Perda No.3 Tahun 2017 Kabupaten Wonosobo 15 Februari 2018

Muhammad Rifai Warga Masyarakat Wonosobo 17 Februari 2019

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, 2008, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Kertha Patrika, Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali,

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi dan Anak Agung Sru Utari, op.cit.,

Ni`matul, 2014, Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

Ni`atul Huda, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Nomensen Sinarno 2014 Negara Hukum Tata Negara Indonesia ,Di Lengkapi Dengan Undang Ung Dasar 1945, dan Undang –Undang No. 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Permata, Aksar Jakarta,

Nurdiaman, .2009. Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara. PT Pribumi Mekar, Bandung:

Nurdin H. kistanto,dkk, 2008 Sejarah wonosobo, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Wonosobo.

Nurdin H. kistanto,dkk, 2008 Sejarah wonosobo: Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosbo, Wonosobo,

Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo

Philipus M Hadjon, 1994 Negara Hukum dan System Ketatanegaraan Repuplik Indonesia , Makalah Pada Simposium Tentang Politik, Hak Asasi Dan Pembangunan dalam rangka dies natalis XL/Lustrum VII Universitas Airlangga, Surabaya,

Pius A. Partan Dan M. Dahlah Al-Barry,2006 Kamus Ilmiah Popular, Arkola, Surabaya.

Praptanugraha, 2008, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 15 Juli 2008: 459 - 473, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Razak, Abdul. 2010. *Syura dan Demokrasi, Persamaan dan Perbedaannya*, Media Akademia, Vol. 25 No. 3.

Ridwan HR, 2007 Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, UII Press, Yogyakarta,

Rina Mautia Iryana, 2010, Mengenal Amandemen, UUD 1945, Cet II, Mutazam Mulia Utama, Jakarta.

Riswandha Ismawan, 2000, Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa, Dalam Menuju Tata Indonesia Baru, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Rizal Andreeyan, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, 2014,Journal Administrasi Negara, Vol. 2 No. 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda,

Robert A. Dahl, 2001, Perihal Demokrasi, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

- Roni Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ryan Monoarfa, 2013 Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Artikel Skripsi, Lex Administratum, Vol. 1 No.2
- Saru Arifin, 2018, Legislatif Drafting /Ilmu perancangan Perundang-Undangan, BPFH UNNES Semarang,
- Satjipto Raharjo. 1998. "Mencari Model Ideal Penyusunan UU Yang Demokrasi (Kajian Sosiologis)". Makalah disampaikan dalam seminar nasional mencari model ideal penyusunan UU yang demokratis dan kongres asosiasi sosiologi hukum Indonesia, Semarang 15-16 April 1998.
- Sirajudin, Didik Sukrino dan Winardi, 2011, Hukum, Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi Keterbukaan Informasi), Setara Press Surabaya
- Sodikin, 2004, Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publishing, Bekasi,
- Soeratno dan Lincoln Asryad, 2003, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Sri Sumantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni Bandung,
- Subakdi. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan: PT. Sekawan Cipta Karya. Solo,
- Philipus M. Hadjon 1997, Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis, Surabaya,
- Sunarno, Siswanto, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 37
- Surayin, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisa, Yrama Widya, Bandung
- Sutopo, 1998 Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bangia II, UNS Pres. Surakarta
- Sugeng Susilo, Masyarakat Kabupaten Wonosobo, Pada Tanggal 16 Februari 2019.
- Tofek Anggota DPRD Ketua Pansus Perda No.3 Tahun 2017 Kabupaten Wonosobo 15 Februari 2019
- Tia Viandari ketua asosiasi pengusaha karaoke Kabupaten Wonosobo 16 Februari 2019
- W Gulo, 2002, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Wahyu Ishardino Satries, 2010, Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang, Jurnal, Vol. 2 No. 2, September 2011,
- Muhammad Rifai Warga Masyarakat Wonosobo 17 Februari 2019
- Y Slamet 1994, pembangunan masyarakat berwawasan berpartisipasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

UNDANG UNDANG

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945

UU No. 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

UU No. 9 tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo

Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo

Lain Lain

Repository.Unhas.ac.id/..Buku%20Cara%20praktis%20menyusun perda

<https://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi> diakses Pukul 12.30 Tanggal 04 Maret 2019

<http://indonesia.tempo.co/..implemetasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indossia> dikses pukul 9:30 tanggal 04 Maret 2019

Badan Pusat Statistik

<http://kbbi.id/yuridis> , tanggal 25 Maret , 2019 Pukul 06.00 Wib

[https://id.Scribd/.../Pembuatan –PERDA-Usulan-Inisiatif Daerah](https://id.Scribd/.../Pembuatan-PERDA-Usulan-Inisiatif-Daerah)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan>

[http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/09/terori-partisipasi masyarakat](http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/09/terori-partisipasi-masyarakat)